



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
SUB UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDY KUSMIRAN
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 488358

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.200.000.000**

1. Tanah Seluas 500 m2 di SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 1248 m2 di SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/221 m2 di SAROLANGUN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/36 m2 di SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di SAROLANGUN , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 3000 m2 di SAROLANGUN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 5000 m2 di SAROLANGUN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000
8. Tanah Seluas 3000 m2 di SAROLANGUN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 300.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/45 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
10. Bangunan Seluas 53.1 m2 di TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 525.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



25.000.000

2. MOBIL, TOYOTA CITY CAR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

500.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 125.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 8.869.248

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.858.869.248

III. HUTANG

Rp. 425.846.962

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.433.022.286

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **26 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.